



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (LPK)

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

2022

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan

Telp/Fax : (0285)421102, 422288

Website : <http://pn-pekalongan.go.id/>

Email : pn.pekalongan.mail@gmail.com

Delegasi : delegasipnpl@gmail.com



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(LPK)
PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB
TAHUN 2022**

PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS IB

Jalan Cendrawasih Nomor 2 Kota Pekalongan

Telp/Fax : (0285) 421102, 422288, Website : <https://pn-pekalongan.go.id>;

Email : pn_pkl@yahoo.com , pn.pekalongan.mail@gmail.com;

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2022. Maksud dan tujuan dari laporan ini sebagai hasil akhir dari aktualisasi program kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama tahun 2022.

Dengan adanya penyusunan laporan ini, diharapkan bisa memberikan informasi mengenai kinerja dari Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB beserta fasilitas-fasilitas sebagai alat bantu dalam memperlancar proses kerja di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2022, semoga dengan adanya laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat mendorong agar menjadi lebih optimal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Wilayah hukum Kota dan Kabupaten Pekalongan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Pekalongan, 30 Desember 2022
**KETUA PENGADILAN NEGERI
PEKALONGAN KELAS IB**

Dr. SALMAN ALFARASI, S.H., M.H.
NIP. 19750728 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
BAB II.....	6
A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.....	6
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	6
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	8
3. Keadaan perkara Tingkat Kasasi.....	10
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	11
B. Penyelesaian Perkara.....	13
1. Jumlah sisa perkara yang diputus.....	13
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	15
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK :.....	17
4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi.....	18
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.....	18
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan).....	18
1. Posbakum.....	19
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.....	19
3. Perkara Prodeo.....	20
BAB III. SUMBER DAYA MANUSIA.....	21
A. Mutasi.....	22
B. Promosi.....	23
C. Pensiun.....	24
D. Diklat.....	24

BAB IV. PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	27
A. Pengelolaan Keuangan	27
1. Realisasi Anggaran Non Teknis :	27
2. Realisasi Anggaran Teknis :	28
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	29
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	34
1. Perangkat Keras	34
2. Perangkat Lunak	34
BAB V. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	38
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	38
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	38
C. Inovasi Pelayanan Publik	40
BAB VI. PENGAWASAN	49
A. Internal	49
B. Evaluasi	51
BAB VII. PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Rekomendasi	53

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2022	6
Tabel. 2.2. Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2022	7
Tabel. 2.3. Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Banding pada Tahun 2022	8
Tabel. 2.4. Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Banding pada Tahun 2022	9
Tabel. 2.5. Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi pada Tahun 2022	10
Tabel. 2.6. Tabel Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Kasasi pada Tahun 2022	11
Tabel. 2.7. Tabel Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan PK pada Tahun 2022	11
Tabel. 2.8. Tabel Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan PK pada Tahun 2022	12
Tabel. 2.9. Tabel Keadaan sisa Perkara Perdata yang diputus pada Tahun 2022	13
Tabel. 2.10. Tabel Keadaan sisa Perkara Pidana yang diputus pada Tahun 2022	14
Tabel. 2.11. Tabel Keadaan Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022	15
Tabel. 2.12. Tabel Keadaan Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022	16
Tabel. 3.1. Tabel SDM pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB ..	22
Tabel. 3.2. Tabel SDM yang Mutasi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB	23
Tabel. 3.3. Tabel SDM yang Promosi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB	24
Tabel. 3.4. Tabel SDM yang Pensiom pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB	24
Tabel. 3.5. Tabel SDM yang mengikuti Diklat, Pelatihan, Sosialisasi	

maupun Bimbingan Teknis Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB	26
Tabel. 4.1. Tabel Kendaraan Dinas	29
Tabel. 4.2. Tabel Rumah Dinas	30
Tabel. 4.3. Tabel Sarana dan Prasarana	33
Tabel. 4.4. Tabel Capaian EIS PN Pekalongan 2022	37
Tabel. 6.1. Tabel Hakim Pengawas	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1. Grafik Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2022	6
Gambar. 2.2. Grafik Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2022	7
Gambar. 2.3. Grafik Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2022 ...	8
Gambar. 2.4. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Banding Tahun 2022	9
Gambar. 2.5. Grafik Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Banding Tahun 2022	9
Gambar. 2.6. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi Tahun 2022	10
Gambar. 2.7. Grafik Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Kasasi Tahun 2022	11
Gambar. 2.8. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi Tahun 2022	12
Gambar. 2.9. Grafik Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan PK Tahun 2022	13
Gambar. 2.10. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang diputus Tahun 2022	14
Gambar. 2.11. Grafik Keadaan sisa Perkara Pidana yang diputus Tahun 2022	15
Gambar. 2.12. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang diputus tepat waktu pada Tahun 2022	16
Gambar. 2.13. Grafik Keadaan Perkara Pidana yang diputus tepat waktu pada Tahun 2022	17
Gambar. 2.14. Grafik Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas yang diputus tepat waktu pada Tahun 2022	17
Gambar. 5.1. Gambar Meja PTSP PN Pekalongan	39
Gambar. 5.2. Gambar Meja PTSP beserta Petugas PTSP pada Pengadilan Negeri Pekalongan	40

Gambar. 5.3. Gambar Streaming Ruang Lobby PTSP Pengadilan Negeri Pekalongan	41
Gambar. 5.4. Gambar Streaming Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan	41
Gambar. 5.5. Gambar Layanan PTSP Online melalui Website Pengadilan Negeri Pekalongan	42
Gambar 5.6. Gambar Layanan Asisten Virtual “APIKA”	43
Gambar 5.7. Gambar Aplikasi “SETIA”	44
Gambar 5.8. Gambar Aplikasi “ MONALISA”	45
Gambar 5.9. Gambar Alikasi “SIAPP”	46
Gambar 5.10. Gambar Video Informasi Pelayanan Publik dengan Bahasa Isyarat	47
Gambar 5. 11. Gambar Kartu Antrian Prioritas	48
Gambar 6.1. Gambar Dokumentasi Pemberian Reward oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Pekalongan	52

BAB I PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan Garis Besar Haluan Negara.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai pelaku pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut dilandasi dengan Visi dan Misi yaitu :

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang Agung

Misi:

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*
- 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan di Kota dan Kabupaten Pekalongan*
- 3. Meningkatkan kualitas aparatur Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakkarimah*
- 4. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen peradilan*
- 5. Meningkatkan pengawasan internal yang efektif dan efisien*
- 6. Meningkatkan sarana dan prasarana*

Seiring dengan langkah-langkah kebijakan Mahkamah Agung R.I, di tahun 2022 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melaksanakan upaya-upaya :

1. Peningkatan Kinerja Dalam Penegakan Hukum;

Dalam rangka peningkatan kinerja dalam penegakan hukum ini Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dalam tahun 2022 berusaha untuk mengikut sertakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Staf dalam kegiatan-kegiatan Pendidikan/Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Work shop baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi maupun oleh Badan/Lembaga lainnya agar menambah wawasan dan meningkatkan kinerja serta dalam melaksanakan tugas pokok/fungsinya lebih baik dan lebih profesional.

a. Penyelesaian perkara :

Untuk penyelesaian perkara yang masuk tetap berupaya dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Dalam mewujudkan hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dengan dibantu oleh

Panitera dan Sekretaris secara berkala mengadakan bimbingan kepada para Hakim, Panitera Pengganti dan Jusurita/Jusurita Pengganti, serta secara berkala juga diadakan rapat bulanan yang diikuti oleh Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural dan Fungsional, para Jusurita/Jusurita Pengganti dan staf serta para pramubhakti guna mengevaluasi penyelesaian perkara pada kepaniteraan dan penyelesaian administrasi pada bagian kesekretariatan.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja Hakim dan Panitera Pengganti dalam penyelesaian perkara, Pimpinan Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penghargaan kepada Hakim dan Panitera Pengganti terbaik yang dapat menyelesaikan perkara (minutasi) dengan cepat, hal ini bertujuan untuk memacu semangat para Hakim dan para Panitera Pengganti dalam menyelesaikan perkara.

b. Pemenuhan Sarana dan Prasarana :

i. Kendaraan Dinas roda 4 (empat):

Pada tahun tahun 2022 kendaraan roda 4 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berjumlah 7 (tujuh) unit, dengan rincian 3 (tiga) unit milik Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, 2 (dua) unit pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan 2 (dua) unit pinjaman dari Pemerintah Kota Pekalongan.

ii. Kendaraan Dinas Roda 2 (dua);

Di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk tahun 2022 tidak ada penambahan kendaraan bermotor roda 2. Untuk saat ini Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB memiliki 6 unit sepeda motor namun 1 (satu) unit dalam keadaan rusak berat, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diharapkan adanya penambahan kendaraan dinas roda dua terutama untuk para Jusurita guna pelaksanaan tugas pemanggilan pihak-pihak yang berperkara dan pemberitahuan putusan tingkat pertama, tingkat banding maupun

kasasi/peninjauan kembali/grasi serta untuk Pejabat Struktural yang tugasnya berhubungan dengan instansi lain.

iii. Gedung , Bangunan dan Rumah Dinas ;

Pada tahun 2022 Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sementara telah dilakukan pengguruan dan peninggian pada sebagian ruangan yang belum ditinggikan yakni pada ruang hakim besar, ruang kepaniteraan pidana, ruang tahanan dan depan ruang tahanan. Peninggian ruangan ini dilakukan untuk menghindari banjir yang selalu masuk ruangan pada saat musim penghujan tiba. Selanjutnya jumlah rumah dinas sebanyak 17 (tujuh belas) unit dengan kondisi 2 (dua) unit ditempati oleh Pegawai dan 15 (lima belas) unit kosong dengan kondisi rusak berat dan perlu dilakukan perbaikan/rehab. Rumah Dinas untuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk ditempati sehingga perlu perbaikan/rehab total.

iv. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran ;

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2022 tidak ada pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor.

v. Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB untuk tahun 2022 ada pengadaan dan penambahan alat pengolah data dan komunikasi dengan rincian sebagai berikut :

- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yaitu :

PC Kepaniteraan sejumlah : 6(enam) Unit.

Printer sejumlah : 2(dua) Unit.

c. Pelayanan pada masyarakat :

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mulai pertengahan tahun 2018 telah melaksanakan perubahan sistem pelayanan yaitu dengan menerapkan **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)** dengan memanfaatkan/memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada sebagaimana yang diperintahkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang pada Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tingkat pertama yang masuk dan diputus pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama tahun 2022 baik perkara perdata maupun perkara pidana adalah sebagai berikut :

a) Keadaan Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2022 :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara masuk	Perkara Diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan/Bth/Plw	19	55	59	15
2	Gugatan Sederhana	3	23	25	1
3	Permohonan	11	234	241	4

Tabel. 2.1. Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2022



Gambar. 2.1. Grafik Keadaan Perkara Perdata Tingkat Pertama Tahun 2022

b) Keadaan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2022:

No	Jenis Perkara	Sisa tahun lalu	Perkara masuk	Perkara Yang diputus	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	37	299	298	38
2	Pidana Anak	3	11	14	0
3	Pidana Singkat/Cepat	0	8	8	0
4	Praperadilan	0	2	2	0
5	Lalu Lintas	0	9300	9300	0

Tabel. 2.2. Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2022



Gambar. 2.2. Grafik Keadaan Perkara Pidana Tingkat Pertama Tahun 2022



Gambar. 2.3. Grafik Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2022

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat pertama yang dimohonkan banding pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama tahun 2022 baik perkara perdata maupun perkara pidana adalah sebagai berikut :

a) Keadaan perkara perdata yang dimintakan banding pada Pengadilan Negeri Pekalongan tahun 2022 :

No	Jenis Perkara	Sisa tahun lalu	Perkara yang banding	Perkara yang diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan/Bth/Plw	5	11	12	4

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Banding pada Tahun 2022



Gambar. 2.4. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Banding Tahun 2022

b) Keadaan perkara pidana yang dimintakan banding tahun 2022 :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Banding	Perkara diputus	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	2	19	20	1
2	Pidana Anak	0	1	1	0

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Banding pada Tahun 2022



Gambar. 2.5. Grafik Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Banding Tahun 2022

3. Keadaan perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara yang dimohonkan kasasi pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama tahun 2022 baik perkara perdata maupun perkara pidana adalah sebagai berikut :

a) Keadaan perkara perdata yang dimohonkan kasasi selama periode Tahun 2022 :

No	Jenis Perkara	Sisa tahun lalu	Perkara kasasi	Perkara diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan/Bth/Plw	11	8	4	15
2	Permohonan	0	1	0	1

Tabel 2.5. Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi pada Tahun 2022



Gambar. 2.6. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi Tahun 2022

b) Keadaan perkara pidana yang dimintakan Kasasi tahun 2022 :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Kasasi	Perkara Diputus	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	5	7	8	4
2	Pidana Anak	0	1	0	1

Tabel 2.6. Tabel Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Kasasi pada Tahun 2022



Gambar. 2.7. Grafik Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan Kasasi Tahun 2022

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama tahun 2022 baik perkara perdata maupun perkara pidana adalah sebagai berikut :

a) Keadaan perkara perdata yang dimintakan PK tahun 2022 :

No	Jenis Perkara	Sisa tahun lalu	Perkara yang PK	Perkara yang diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan/Bth/Plw	2	1	2	1

Tabel 2.7. Tabel Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan PK pada Tahun 2022



Gambar. 2.8. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang dimohonkan PK Tahun 2022

b) Keadaan perkara pidana yang dimintakan PK tahun 2022 :

No	Jenis Pekara	Perkara PK	Perkara Diputus	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	0	0	0
2	Pidana Anak	0	0	0

Tabel 2.8. Tabel Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan PK pada Tahun 2022



Gambar. 2.9. Grafik Keadaan Perkara Pidana yang dimohonkan PK Tahun 2022

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah sisa perkara yang diputus

Keadaan jumlah sisa Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2021 yang diselesaikan atau diputus pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a) Keadaan jumlah sisa perkara perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada akhir Tahun 2021 yang telah diselesaikan dan diputus pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Perkara	Sisa perkara tahun lalu	Perkara Diputus	Sisa Perkara
1	Gugatan/Bth/Plw	19	19	0
2	Permohonan	11	11	0
3	Gugatan Sederhana	3	3	0

Tabel 2.9. Tabel Keadaan sisa Perkara Perdata yang diputus pada Tahun 2022



Gambar. 2.10. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang diputus Tahun 2022

- b) Keadaan jumlah sisa perkara pidana Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada akhir Tahun 2021 yang selanjutnya diputus dan diselesaikan Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun Lalu	Perkara Diputus	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	37	37	0
2	Pidana Anak	3	3	0
3	Pidana Singkat/Cepat	0	0	0
4	Prapid	0	0	0
5	Lalu Lintas	0	0	0

Tabel 2.10. Tabel Keadaan sisa Perkara Pidana yang diputus pada Tahun 2022



Gambar. 2.11. Grafik Keadaan sisa Perkara Pidana yang diputus Tahun 2022

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Keadaan Perkara yang diselesaikan atau diputus tepat waktu, baik perkara perdata ataupun perkara pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2022 sebagai berikut :

a) Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2022 yang diputus tepat waktu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Perkara Diputus Tepat Waktu	Sisa Perkara
1	Gugatan/Bth/Plw	19	55	59	39	15
2	Gugatan Sederhana	3	23	25	25	0
3	Permohonan	11	234	241	241	4

Tabel 2.11. Tabel Keadaan Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022



Gambar. 2.12. Grafik Keadaan Perkara Perdata yang diputus tepat waktu pada Tahun 2022

b) Keadaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2022 diputus tepat waktu sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Masuk	Perkara Diputus	Putus Tepat Waktu	Sisa Perkara
1	Pidana Biasa	37	299	298	298	0
2	Pidana Anak	3	11	14	14	0
3	Pidana Singkat/Cepat	0	8	8	8	0
4	Praperadilan	0	2	2	2	0
5	Lalu Lintas	0	9300	9300	9300	0

Tabel 2.12. Tabel Keadaan Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022



Gambar. 2.13. Grafik Keadaan Perkara Pidana yang diputus tepat waktu pada Tahun 2022



Gambar. 2.14. Grafik Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas yang diputus tepat waktu pada Tahun 2022

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK :

a) Banding

- 1) Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan Banding ada sejumlah : **48 perkara**;
Terdiri dari 45 perkara gugatan, 2 perkara perlawanan dan 1 perkara bantahan;

- 2) Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan Banding ada sejumlah : **292 perkara**;
terdiri dari 279 perkara pidana biasa dan 13 perkara pidana anak;

b) Kasasi

- 1) Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan Kasasi ada sejumlah : **292 perkara**
Terdiri dari 240 perkara permohonan dan 52 perkara G/Plw/Bth;
- 2) Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan Kasasi ada sejumlah : **304 perkara**

c) Peninjauan Kembali (PK)

- 1) Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan PK ada sejumlah : **58 perkara**;
- 2) Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan PK ada sejumlah : **312 perkara**;

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi

Jumlah Perkara perdata yang berhasil dimediasi : 2 perkara ;

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversifikasi

Selama Periode Tahun 2022 terdapat 1(satu) perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (sertifikasi ISO Pengadilan)

Progres program akreditasi dimulai pada tahun 2015 yang merupakan tahun kelahiran akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum. Tahun 2016 merupakan tahun pembelajaran awal dalam implementasi. Tahun 2017 adalah tahun penguatan dan tahun 2018 adalah tahun eksistensi **Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum** dimana seluruh Pengadilan se-Indonesia telah terakreditasi dengan predikat minimal "B" dan maksimal "A".

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum selain sebagai sarana pembinaan dan pengawasan juga merupakan

instrumen evaluasi terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia. Temuan / ketidaksesuaian asesmen merefleksikan kondisi nyata di Pengadilan yang memerlukan penyelesaian, tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan agar manajemen mutu dapat terjamin kualitasnya. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan meraih predikat **A**.

1. Posbakum

Untuk mensukseskan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran melalui DIPA 03 tahun 2022 sejumlah Rp. 159.880.000,- (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Termasuk didalamnya anggaran untuk penyelenggaraan Layanan Pos Bantuan Hukum sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) meliputi Belanja Jasa Konsultan yaitu untuk Honorer Advokat/Pengacara Piket.

Menindak lanjuti hal tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah menyelenggarakan Posbakum (Pos Bantuan Hukum) bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebagai **Pihak Pertama** dan Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran sebagai **Pihak Kedua**.

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pelayanan publik adalah merupakan salah satu prioritas dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas sehari-hari. Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama masa

pandemi tidak melaksanakan sidang keliling secara berkala khususnya sidang perkara lalulintas hal ini dilakukan dalam rangka pencegahan covid-19. diharapkan setelah pandemi berakhir kegiatan sidang keliling akan terus dilaksanakan tentunya dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota dan Kabupaten Pekalongan serta dengan Polresta Pekalongan maupun Polres Kaje di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

3. Perkara Prodeo

Untuk menyukseskan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sebesar Rp. 1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara yang meliputi :

- **Biaya Perkara** : Belanja Bahan, Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi , Belanja Jasa Profesi dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota ;

- **Biaya Eksekusi** : Belanja Bahan dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB selama periode Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama/Jabatan	Pangkat/Golongan	Pendidikan	Ket
1	Dr. H. Salman Alfarasi, S.H.,M.H. (Ketua Pengadilan Negeri)	Pembina Utama Muda (IV/c)	S3	Mutasi Masuk
2	Rahmat Sanjaya, SH., MH. (Wakil Ketua PN)	Pembina TK.I (IV/b)	S2	Promosi Keluar
3	Elin Pujiastuti, S.H., M.H. (Hakim)	Pembina TK.I (IV/b)	S2	Mutasi Keluar
4	Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. (Hakim)	Penata Tk.I (III/d)	S1	
5	Muhammad Taofik, S.H.,M.H. (Hakim)	Penata TK.I (III/d)	S1	
6	Mukhtari, SH., MH. (Hakim)	Penata TK.I (III/d)	S2	
7	Budi Setyawan, S.H. (Hakim)	Penata TK.I (III/d)	S1	
8	Muhammad Dede Idham, S.H. (Hakim)	Penata TK.I (III/d)	S1	
9	Fatria Gunawan , SH., MH. (Hakim)	Penata TK.I (III/d)	S2	
10	Tris Hariyadi, SH., MH. (Panitera)	Pembina (IV/a)	S2	
11	Estiningsih Dwi Wahyuni, S.H. (Sekretaris)	Penata TK.I (III/d)	S1	
12	Ria Soraya, S.H. (Panitera Muda Hukum)	Penata Tk.I (III/d)	S1	
13	Agus Giharno, S.H, (Panitera Muda Perdata)	Penata Tk.I (III/d)	S1	Mutasi Keluar
14	Sudirman, S.H. (Panitera Muda Pidana)	Penata Tk.I (III/d)	S1	Mutasi Keluar
15	Richardus Helmy Hartandya, S.H.,M.H. (Panitera Muda Pidana)	Pembina (IV/a)	S2	Mutasi Masuk
16	Dra. Lidia Sumihar Mayana.(Kasubbag Kepegawaian dan Ortala)	Penata TK.I (III/d)	S1	Pensiun
17	Warjanto Abduloh, S.H. (Kasubbag Umum Keuangan)	Penata (III/c)	S1	
18	Sri Peni Pramuwati, S.Kom. (Kasubbag PTIP)	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	Promosi Masuk

19	Musyarofah (Panitera Pengganti)	Penata (III/c)	SMA	Pensiun
20	Wuri Retnowati, S.H. (Panitera Pengganti)	Penata (III/c)	S1	Mutasi Keluar
21	Endah Winarni, S.H. (Panitera Pengganti)	Penata (III/c)	S1	
22	Dwi Indiastuti, SH. (Panitera Pengganti)	Penata (III/c)	S1	
23	M. Evans Firmansyah, S.H. (Panitera Pengganti)	Penata Muda Tk. I (III/b)	S1	Promosi Masuk
24	Ratna Wijayanti (Jurusita)	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA	Pensiun
25	Sari Siti Naomi, S.H, (Jurusita Pengganti)	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1	
26	Cristianto (Jurusita Pengganti)	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA	
27	Kasidi (Pengadministrasi Persuratan)	Penata Muda Tk.I (III/b)	SMA	
28	Khoiriyah Sari Pertiwi, S.A.P (Analisis Tata Laksana)	Penata Muda (III/a)	S1	
29	Tiara Gumilang, S.H. (Analisis Perkara Peradilan)	Penata Muda (III/a)	S1	
30	Novelsa Rizkita Dinanti, S.H. (Analisis Perkara Peradilan)	Penata Muda (III/a)	S1	
31	Octina Fahriza Utami, A.Md.(Pengadministrasi Register Perkara)	Pengatur(II/c)	D3	
32	Eka Nur Baiti, S.H. (Analisis Perkara Peradilan)	Penata Muda (III/a)	S1	CPNS
33	Aan Januardi, S.Sos. (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan)	Penata Muda (III/a)	S1	CPNS
34	Robertus Bagus Irmanto, A.Md (Pengelola Perkara)	Pengatur (II/c)	D3	CPNS
35	Risma Ruli Sitorus, A.Md (Pengelola Barang Milik Negara)	Pengatur (II/c)	D3	CPNS

Tabel 3.1. Tabel SDM pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

A. Mutasi

Selama periode Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mendapat Tambahan 1 (satu) orang Hakim yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Daftar Hakim, Pegawai yang mutasi baik yang pindah/keluar dari Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB maupun Hakim, Pegawai dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang datang/masuk ke Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Dr. H. Salman Alfarasi, SH., MH	Ketua PN Bangko	Ketua PN Pekalongan
2	Sudirman, SH	Panitera Muda Pidana PN Pekalongan	Panitera Pengganti PT Banten
3	Agus Giharno, SH	Panitera Muda Perdata PN Pekalongan	Panitera Pengganti PT Banten
4	Wuri Retnowati, SH	Panitera Pengganti PN Pekalongan	Panitera Pengganti PN Semarang
5	Eka Nur Baiti, SH	-	CPNS dengan Jabatan Analis Perkara Peradilan
6	Aan Januardi, S.Sos	-	CPNS dengan Jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
7	Robertus Bagus Imanto, A.Md	-	Pengelola Perkara
8	Risma Ruli Sitorus, A.Md	-	Pengelola Barang Milik Negara

Tabel 3.2. Tabel SDM yang Mutasi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

B. Promosi

Selama periode Tahun 2022 Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang memperoleh promosi masuk ataupun promosi keluar jabatan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Rahmat Sanjaya, SH., MH.	Wakil Ketua PN Pekalongan	Ketua PN Bitung

2	Richardus Helmy Hartandya, SH., MH	Panitera Pengganti PN Semarang	Panitera Muda PN Pekalongan
3	Sri Peni Pramuwati, S.Kom	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Pekalongan	Kasubbag PTIP PN Pekalongan
4	M. Evans Firmansyah, SH	Jurusita PN Salatiga	Panitera Pengganti PN Pekalongan

Tabel 3.3. Tabel SDM yang Promosi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

C. Pensiun

Pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB terdapat 3 (tiga) pegawai yang memasuki masa pensiun, diantaranya :

No	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	Musyarofah	Panitera Pengganti PN Pekalongan	1 Mei 2022
2	Dra. Lidia Sumihar Mayana	Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA PN Pekalongan	1 Juni 2022
3	Ratna Wijayanti	Jurusita PN Pekalongan	1 Desember 2022

Tabel 3.4. Tabel SDM yang Pensiun Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

D. Diklat

Daftar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang mengikuti Diklat, Pelatihan, Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis pada tahun 2022.

No	Nama Pegawai	Jenis Diklat/Pelatihan/Sosialisasi	Keterangan
1	Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bagi Hakim Peradilan Umum Kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI (29 Agustus s.d. 30 September 2022)	Secara Virtual dan Tatap Muka
2	Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., M.H.	Pelatihan Online Audit for Non Auditor Angkatan 1 s.d. 4 dari tempat tugas tahun 2022 (3 s.d. 7 Oktober 2022)	Secara virtual

3	Fatria Gunawan, S.H.,M.H.	Pelatihan Online Audit for Non Auditor Angkatan 1 s.d. 4 dari tempat tugas tahun 2022 (3 s.d. 7 Oktober 2022)	Secara virtual
4	Muhammad Taofik, S.H.,M.H.	Pelatihan Online Audit for Non Auditor Angkatan 1 s.d. 4 dari tempat tugas tahun 2022 (3 s.d. 7 Oktober 2022)	Secara virtual
5	Mukhtari, S.H.,M.H.	Pelatihan Online Audit for Non Auditor Angkatan 1 s.d. 4 dari tempat tugas tahun 2022 (3 s.d. 7 Oktober 2022)	Secara virtual
6	Muhammad Dede Idham, S.H.	Pelatihan Online Audit for Non Auditor Angkatan 1 s.d. 4 dari tempat tugas tahun 2022 (3 s.d. 7 Oktober 2022)	Secara virtual
7	Budi Setyawan, S.H.	Pelatihan Online Audit for Non Auditor Angkatan 1 s.d. 4 dari tempat tugas tahun 2022 (3 s.d. 7 Oktober 2022)	Secara virtual
8	Dr. H. Salman Alfarasi, S.H., M.H.	Sosialisasi dan Bimbingan teknis E-Berpadu (26 s.d. 28 Oktober 2022)	Kabupaten Semarang
9	Tris Hariyadi, S.H., M.H.	Sosialisasi dan Bimbingan teknis E-Berpadu (26 s.d. 28 Oktober 2022)	Kabupaten Semarang
10	Novelsa Rizkita Dinanti, S.H.	Sosialisasi dan Bimbingan teknis E-Berpadu (26 s.d. 28 Oktober 2022)	Kabupaten Semarang
11	Estiningsih Dwi Wahyuni, S.H.	Pelatihan Online Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Angkatan 1 s.d. 5 dari tempat tugas masing-masing (24 sd 28 Oktober 2022)	Secara virtual

12	Estiningsih Dwi Wahyuni, S.H.	Bimbingan Teknis Pengelola Kepegawaian (5 s.d. 7 Desember 2022)	Karanganyar
13	Khoiriyah Sari Pertiwi, S.A.P	Bimbingan Teknis Pengelola Kepegawaian (5 s.d. 7 Desember 2022)	Karanganyar
14	Warjanto Abduloh, S.H.	Koordinasi Bendahara Pengeluaran (18 s.d. 20 Desember 2022)	Jakarta
15	Estiningsih Dwi Wahyuni, S.H.	Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan dan Penganggaran di Wilayah Semarang Tahun Anggaran 2022 (26 s.d. 28 Desember 2022)	Di Kabupaten Semarang
16	Sri Peni Pramuwati, S.Kom	Bimbingan Teknis Bidang Perencanaan dan Penganggaran di Wilayah Semarang Tahun Anggaran 2022 (26 s.d. 28 Desember 2022)	Di Kabupaten Semarang

Tabel 3.5. Tabel SDM yang mengikuti Diklat, Pelatihan, Sosialisasi maupun Bimbingan Teknis Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2022 terdapat dua DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Pengelolaan anggaran DIPA Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Non Teknis :

Realisasi Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA- 005.01.2.097741/2022 tanggal 17 Nopember 2021 dengan prosentase sebesar **98,71%** dengan rincian sebagai berikut;

1066.EAA.001. Layanan Perkantoran

001. Gaji dan Tunjangan

Pagu Anggaran	= Rp. 4.826.782.000,-
Pagu Anggaran Revisi Terakhir	= Rp. 3.776.782.000,-
Realisasi Anggaran	= Rp. 3.730.582.904,-
Sisa Anggaran	= Rp. 46.199.096,-
Prosentase Realisasi Anggaran	= 98,78%

002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Pagu Anggaran	= Rp. 1.346.862.000,-
Pagu Anggaran Revisi Terakhir	= Rp. 1.362.966.000,-
Realisasi Anggaran	= Rp. 1.341.486.159,-
Sisa Anggaran	= Rp. 21.479.841,-
Prosentase Realisasi Anggaran	= 98,42%

1066.EAC.003. Layanan Dukungan Manajemen Peradilan

052. Non Operasional Satker Daerah

Pagu Anggaran	= Rp. 5.000.000,-
Pagu Anggaran Revisi Terakhir	= Rp. 5.000.000,-

Realisasi Anggaran	= Rp. 5.000.000,-
Sisa Anggaran	= Rp. 0,-
Prosentase Realisasi Anggaran	= 100%

1071.EAD.001. Layanan Sarana Internal

052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Pagu Anggaran	= Rp. 91.000.000,-
Pagu Anggaran Revisi Terakhir	= Rp. 91.000.000,-
Realisasi Anggaran	= Rp. 91.000.000,-
Sisa Anggaran	= Rp. 0,-
Prosentase Realisasi Anggaran	= 100%

2. Realisasi Anggaran Teknis :

Realisasi Anggaran Teknis DIPA Nomor : SP DIPA-005.03.2.099094/2021 tanggal 17 Nopember 2021 dengan prosentase sebesar **97,69%** dengan rincian sebagai berikut:

1049. BCA.033. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah

Pagu Anggaran	= Rp. 132.540.000,-
Realisasi Anggaran	= Rp. 130.580.808,-
Sisa Anggaran	= Rp. 1.959.192,-
Prosentase Realisasi Anggaran	= 98,52 %

1050. QBA.007. Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Jawa Tengah

Pagu Anggaran	= Rp. 1.840.000,-
Realisasi Anggaran	= Rp. 100.000,-
Sisa Anggaran	= Rp. 1.740.000,-
Prosentase Realisasi Anggaran	= 5,43 %

1049.QBA.032. Pos Bantuan Hukum

Pagu Anggaran	= Rp.	24.000.000,-
Realisasi Anggaran	= Rp.	24.000.000,-
Sisa Anggaran	= Rp.	0,-
Prosentase Realisasi Anggaran	=	100 %

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2022 :

Selama Periode Tahun 2022 Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari DIPA 01 :

Estimasi sebesar	= Rp.	2.823.430,-
Realisasi penerimaan sebesar	= Rp.	837.144,-
Prosentase realisasi penerimaan	=	29,29 %

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari DIPA 03 :

Estimasi sebesar	= Rp.	34.736.082
Realisasi penerimaan sebesar	= Rp.	29.796.500
Prosentase realisasi penerimaan	=	85,77 %

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas dan dedikasi tinggi serta kuantitas yang masih kurang, Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak.

Selama ini sarana dan prasarana yang ada masih sangat terbatas dan kurang memadai, hal ini terjadi karena banyak sarana dan prasarana yang telah dalam kondisi rusak berat dan masih dalam proses penghapusan sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman yang pada akhirnya mampu mewujudkan suatu penyelesaian

tugas dengan efektif dan efisien sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

1. Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Minibus (Toyota Inova) (Transfer Masuk MA RI)	2009	1			
2	Minibus (Toyota Kijang) (Drooping Kanwil)	1997			1	
3	Minibus (Toyota Avanza) (Transfer Masuk MA RI)	2021	1			
4	Minibus (Toyota Inova) (Pinjam Pakai Pemkot)	2021	1			
5	Minibus (Toyota Inova) (Pinjam Pakai Pemkab)	2021	1			
6	Minibus (Toyota Kijang) (Pinjam Pakai Pemkab)	2021	1			
7	Minibus (Toyota Inova) (Pinjam Pakai Pemkot)	2022	1			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda Megapro	2005		2		
2	Suzuki Thunder	2008		1		
3	Bebek Honda Supra X	2005		2		
4	Suzuki A100	1994			1	

Tabel. 4.1. Tabel Kendaraan Dinas

Dalam DIPA Tahun 2022 tidak terdapat pengadaan Kendaraan roda 4 maupun kendaraan Roda 2, dan pada tahun 2022 tidak ada penghapusan terhadap kendaraan dinas baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua (Rumah Negara Golongan I Tipe B)	1	1			

	Permanen)					
2	Rumah Dinas Wakil Ketua (Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen)	1			1	
3	Rumah Dinas Hakim (Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen)	15			15	

Tabel. 4.2. Tabel Rumah Dinas

Dalam DIPA Tahun 2022 tidak terdapat pengadaan Rumah Dinas, dan pada tahun 2022 tidak ada penghapusan terhadap Rumah-rumah Dinas.

3. Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
I	Sarana/Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	2	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang	4	
7	Ruang Kepaniteraan	3	
8	Ruang Sub Bagian	3	
9	Ruang Server	1	
10	Ruang Arsip	5	
11	Ruang Mediasi/Diversi	1	
12	Ruang Jaksa	1	
13	Ruang Tunggu Sidang	1	
14	Ruang Laktasi/kesehatan	1	
15	Ruang Posbakum	1	
16	Ruang Perpustakaan	1	
17	Ruang Command Center	1	

18	Ruang Dharmayukti Karini	1	
19	Ruang Kaukus	-	
II	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Server	3	Baik : 2; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 1;
2	Komputer(Personal Computer)	59	Baik : 34; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 25;
3	Laptop	24	Baik : 19; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 5;
4	LCD Projector/Infocus	2	Baik : 2 ;
5	Scanner	2	Baik : 1; Rusak Ringan : 1;
6	PABX	3	
7	Mesin Fotocopy	1	
8	AC split	31	Baik : 22; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 9;
9	Faximile	1	
10	Stationary Generating Set (Genset)	1	
11	Printer	29	Baik : 27; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 2;
12	Router	1	
13	UPS	14	
14	Kipas Angin	25	Rusak Berat : 25;
15	Lemari Besi	11	
16	Lemari kayu	58	Baik:45; Rusak Ringan:6; Rusak Berat:7
17	Rak Besi	5	

18	Rak kayu	39	Baik : 34; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 5
19	Filing Cabinet	40	Baik : 30; Rusak Ringan : 1; Rusak Berat : 0;
20	Brandkas	3	
21	CCTV	1	
22	Papan Visual	20	
23	Meja Kerja kayu	161	Baik : 79; Eusak Ringan : 0 Rusak Berat : 82;
24	Kursi besi/metal	121	Baik : 83; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 38;
25	Kursi Kayu	179	Baik : 79; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 100;
26	Sice	15	Baik : 12; Rusak Ringan : 0; Rusak Berat : 3;
27	Bangku Panjang Kayu	59	
28	Meja PTSP	2	
29	Televisi	2	
30	Sound System	2	Baik : 1; Rusak Ringan : 1;
31	Rak server	2	

Tabel. 4.3. Tabel Sarana dan Prasarana

Dalam DIPA Tahun 2022 tidak ada penambahan ruang pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Dalam DIPA Tahun 2022 terdapat pengadaan 6 unit PC untuk Kepaniteraan. Dan pada tahun 2022 tidak ada penghapusan terhadap

sarana/prasarana fasilitas perkantoran.

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Pengelolaan Teknologi Informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik, namun juga sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja yaitu percepatan proses administrasi dalam lingkungan pengadilan disamping penanganan perkara. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Aplikasi SIPP, ECourt dan EBerpadu yang telah diimplementasikan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB yang sangat mendukung terutama peranannya dalam percepatan penanganan perkara, baik perkara perdata, perkara pidana, publikasi jadwal persidangan maupun publikasi putusan perkara. Disamping itu juga adanya aplikasi administrasi dalam bidang kesekretariatan mulai dari Aplikasi SAKTI, KOMDANAS, SIMPONI, SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI), E-BIMA, Eplans, SIRUP LKPP sampai dengan aplikasi SIMARI, SIMAK BMN dan Aplikasi lainnya.

1. Perangkat Keras

Pengelolaan Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB didukung dengan anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin yang didalamnya terdapat anggaran Pemeliharaan Komputer, Pemeliharaan Laptop/Notebook, Pemeliharaan Printer dan Pemeliharaan Genset. Sarana alat pengolah data dan komunikasi berupa : 3 Server, 1 Router, 34 Personal Computer dalam kondisi baik, 19 Laptop dalam kondisi baik , 27 printer, 14 UPS, 2 Scanner, 2 LCD Projector/Infocus.

2. Perangkat Lunak

Dalam Pengelolaan Perangkat Lunak Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melaksanakan backup data aplikasi dan database yang tersimpan diserver secara berkala. Sedangkan untuk pengelolaan Website resmi didukung dengan anggaran sewa hosting/domain. Pelaksanaan Persidangan secara online didukung dengan anggaran lisensi video conference dan langganan internet yang cukup. Selain itu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari untuk melayani

masyarakat pencari keadilan Pengadilan Negeri Pekalongan telah didukung dengan perangkat lunak berupa Software yang mendukung kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB berupa beberapa aplikasi baik di Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan dan juga untuk memudahkan publikasi melalui Website Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

- **Implementasi e-Court di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB**

Era baru Peradilan Indonesia telah menerapkan e-Court atau lebih akrab dengan istilah Peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dibidang administrasi peradilan berbasis elektronik dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) .

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang kemudian telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 bahwa pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak, persidangan sampai dengan proses banding yang semuanya bisa dilakukan secara Elektronik. Pengguna yang dapat mengajukan perkara secara elektronik yakni pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.

Selama Tahun 2022 ini dalam rangka implementasi e-Court Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah mempermudah masyarakat dalam hal pendaftaran perkara permohonan secara elektronik ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat perorangan dengan cara menghubungi petugas PTSP melalui layanan Whatsapp di nomor : 08593284266. Melalui layanan konsultasi Whatsapp ini masyarakat yang akan mengajukan permohonan elektronik akan dilayani oleh petugas dengan cara mengirimkan data diri kepada petugas guna keperluan pembuatan akun ecourt. selanjutnya apabila akun telah berhasil dibuat masyarakat bisa mendaftar perkara permohonan secara

mandiri tanpa harus datang ke Pengadilan.

Selama Periode Tahun 2022 Pendaftaran Perkara perdata melalui e-Court sampai tanggal 31 Desember 2022 adalah **231 Perkara** dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara Gugatan : 46 Perkara;
- Perkara Bantahan : 1 Perkara;
- Perkara Permohonan : 161 Perkara;
- Perkara Gugatan Sederhana : 23 Perkara;

Perkara Perdata yang telah diselesaikan secara e-litigasi sejumlah 19 Perkara dengan perincian sebagai berikut :

- Perkara Gugatan e-litigasi yang sudah putus : 16 Perkara;
- Perkara Gugatan e-litigasi yang masih berjalan : 3 Perkara;

Permohonan banding secara online selama periode Tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Pekalongan telah diterima sejumlah 7 perkara.

- **Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB**

Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Dukungan Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam lingkungan peradilan untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Keberadaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sangat mendukung terutama peranannya dalam percepatan penanganan perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana dan publikasi jadwal persidangan maupun publikasi putusan perkara.

Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah semakin diperkaya dengan beragam fitur apabila dibandingkan dengan versi-versi yang sebelumnya, sehingga dari waktu ke waktu akan ditambahkan berbagai macam fitur. Oleh karena itu dalam implementasi Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) perlu dipastikan tingkat kepatuhan Pengisian data SIPP yang terdiri dari

validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang bisa dicek melalui aplikasi MIS(Monitoring Implementasi SIPP).

Dalam Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Pekalongan selama Tahun 2022 sebagai berikut:

NO	BULAN	NILAI EIS
1	Januari	880,95
2	Februari	904,11
3	Maret	932,27
4	April	942,17
5	Mei	908,40
6	Juni	932,07
7	Juli	922,90
8	Agustus	937,27
9	September	961,08
10	Oktober	960,40
11	Nopember	931,79
12	Desember	968,75

Tabel 4.4. Tabel Capaian EIS PN Pekalongan selama Tahun 2022

Dari Tabel Capaian Nilai EIS diatas menunjukkan bahwa selama Tahun 2022 Nilai EIS pada Pengadilan Negeri Pekalongan selalu diatas 850 Poin.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan merupakan dua konsep utama bagi penyelenggaraan pelayanan pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB. Kedua konsep ini merupakan konsep yang saling terkait satu sama lainnya dan bukanlah merupakan konsep yang relatif baru.

Progres program akreditasi dimulai pada tahun 2015 yang merupakan tahun kelahiran akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum. Tahun 2016 merupakan tahun pembelajaran awal dalam implementasi. Tahun 2017 adalah tahun penguatan dan tahun 2018 adalah tahun eksistensi **Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum** dimana seluruh Pengadilan se-Indonesia telah terakreditasi dengan predikat minimal "B" dan maksimal "A".

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum selain sebagai sarana pembinaan dan pengawasan juga merupakan instrumen evaluasi terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Temuan / ketidaksesuaian asesmen merefleksikan kondisi nyata di Pengadilan yang memerlukan penyelesaian, tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan pemeliharaan agar manajemen mutu dapat terjamin kualitasnya. Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan meraih predikat **A Excellent**.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB mulai pertengahan tahun 2018 telah menyelenggarakan pelayanan publik terutama kepada masyarakat pencari keadilan dengan sistem satu pintu.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan selama Tahun 2022 Pengadilan Negeri Pekalongan telah melaksanakan rehab ruangan PTSP untuk menambah loket meja pelayanan Kasir dan Pojok Ecourt yang sebelumnya terletak terpisah dengan meja PTSP lain.



Gambar 5.1 : Gambar Meja PTSP PN Pekalongan



Gambar 5.2 : Gambar Meja PTSP beserta Petugas PTSP pada Pengadilan Negeri Pekalongan;

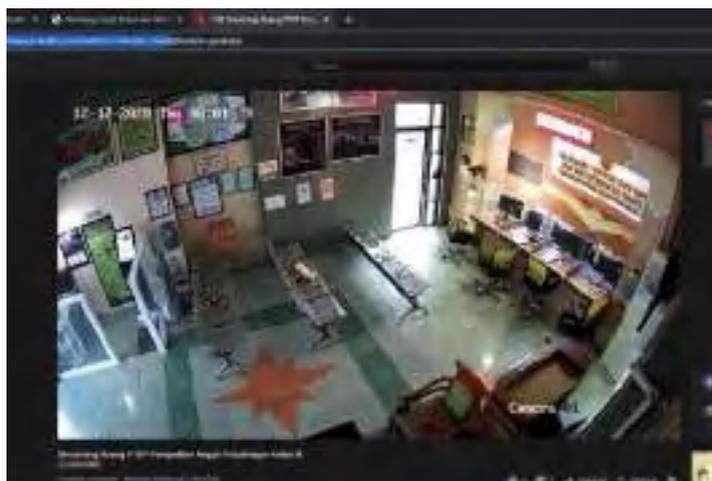
C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka memberi kenyamanan pada pelayanan publik Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah membuat Inovasi dalam bidang pelayanan keluar dan kedalam agar Pelayanan Publik dan pelayanan Intern pada Pengadilan Negeri Pekalongan dapat berjalan dengan lancar dan pengguna jasa pelayanan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB merasakan kenyamanan atas pelayanan dari Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

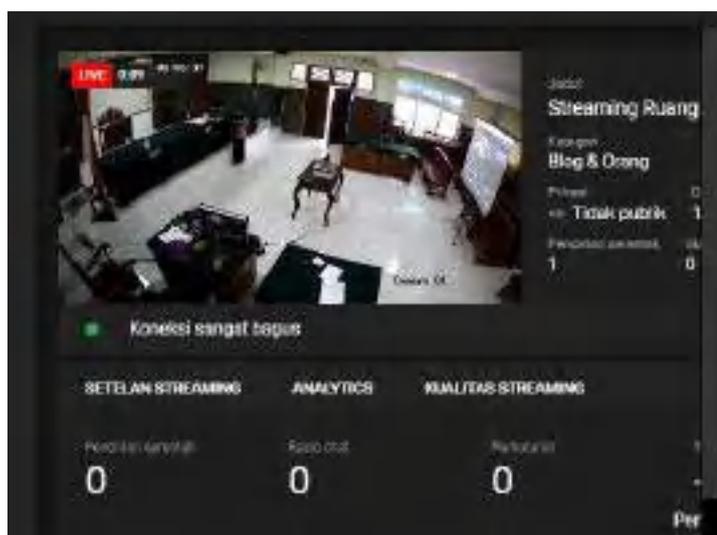
Inovasi Pelayanan Publik yang dimaksud adalah :

1. Streaming PTSP dan Ruang Sidang

Streaming PTSP dan Ruang Sidang adalah salah satu inovasi dalam pelayanan public, yang mana masyarakat bisa memantau dan melihat langsung kondisi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maupun persidangan yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB melalui Kanal Youtube Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.



Gambar. 5.3. Gambar Streaming Ruang Lobby PTSP Pengadilan Negeri Pekalongan

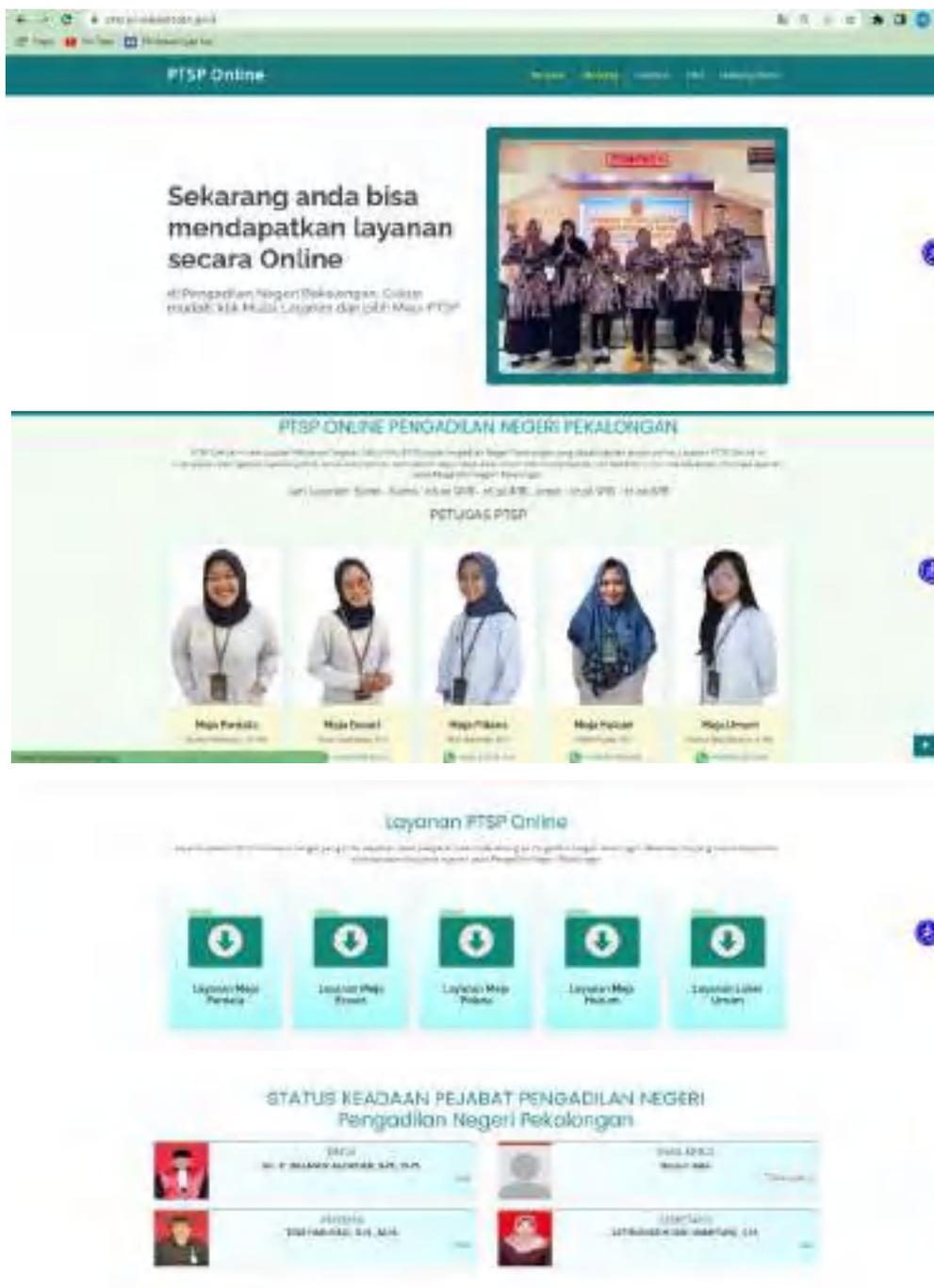


Gambar. 5.4. Gambar Streaming Ruang Sidang Pengadilan Negeri Pekalongan

2. PTSP Online

PTSP Online sebagai bentuk optimalisasi PTSP On Call adalah layanan diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, membutuhkan informasi dan layanan tanpa harus datang ke pengadilan akan tetapi cukup dengan mengakses <https://ptsp.pn-pekalongan.go.id/> kemudian memilih salah satu dari daftar petugas yang akan dihubungi melalui pesan ataupun panggilan whatsapp yang akan dijawab bahkan dilayani langsung oleh petugas PTSP Online.

PTSP Online ini dilengkapi juga dengan panduan jenis-jenis layanan PTSP pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta status kehadiran Pejabat pada Pengadilan Negeri Pekalongan yakni Ketua, Wakil, Panitera dan Sekretaris.



Gambar. 5.5. Gambar Layanan PTSP Online Pengadilan Negeri Pekalongan

3. Asisten Virtual “APIKA”

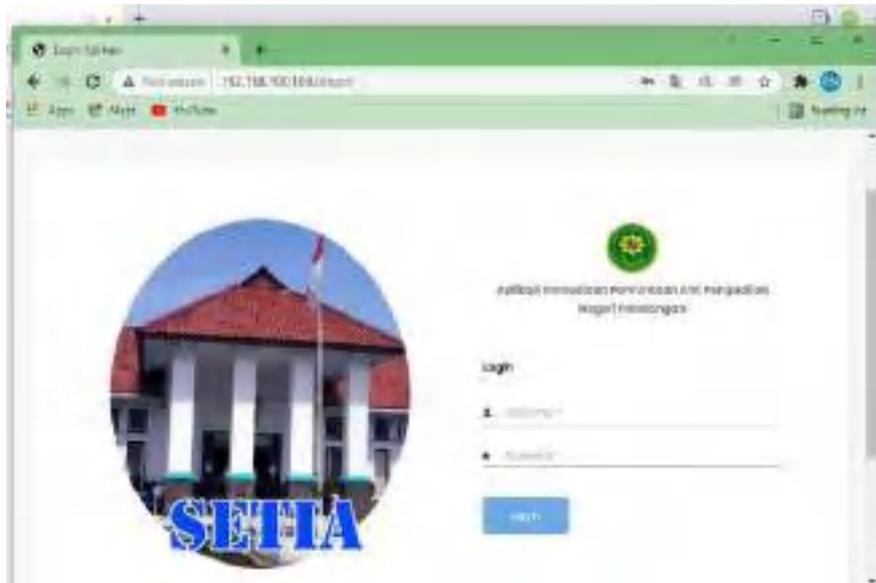
Asisten Virtual “APIKA” merupakan Layanan Whatsapp Bot pada Pengadilan Negeri Pekalongan yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pekalongan terkait jenis-jenis layanan di Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum. Selain itu Apika juga dapat memberikan informasi terkait dengan prosedur pendaftaran perkara perdata, Informasi Perkara, dan jadwal sidang baik perkara perdata maupun perkara pidana yang akan dijawab otomatis dan dapat diakses dengan cara mengirimkan pesan melalui whatsapp pada nomor : 087871548227.



Gambar 5.6. Gambar Layanan Asisten Virtual “APIKA”

4. Aplikasi “SETIA”

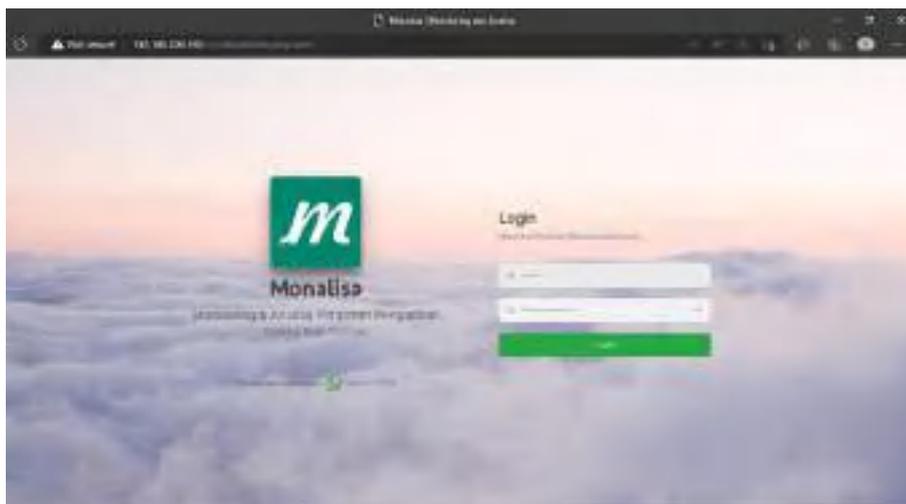
Aplikasi “SETIA” merupakan salah satu inovasi layanan kedalam yang dikeluarkan oleh Bagian Umum dan Keuangan dalam upayanya untuk melayani seluruh bagian baik dari Unsur Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan atau Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pekalongan dalam hal permintaan Alat Tulis Kantor dan kebutuhan sehari-hari perkantoran lainnya yang mana daftar permohonan dapat di input melalui Aplikasi ini dan selanjutnya Bagian Umum dan Keuangan akan mengirimkan kebutuhan perkantoran yang diminta kepada masing-masing pemohon tersebut.

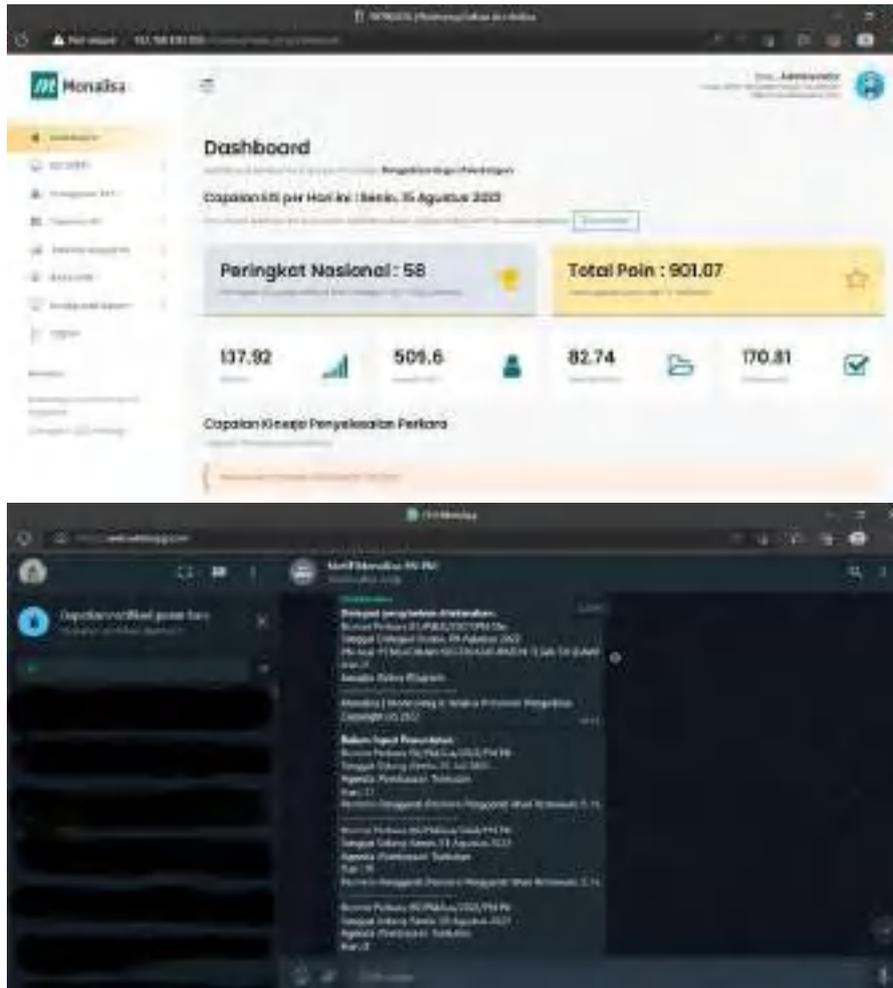


Gambar 5.7. Gambar Aplikasi “SETIA”

5. MONALISA

Monalisa merupakan Inovasi Pengadilan Negeri Pekalongan yang dimanfaatkan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Pekalongan untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi secara elektronik terhadap capaian nilai evaluasi implementasi SIPP, capaian kinerja, capaian realisasi anggaran, capaian penilaian IKM dan IPAK tiap triwulan serta memberikan notifikasi monitoring implementasi sipp melalui pesan Whatsapp.





Gambar 5.8. Gambar Aplikasi “MONALISA”

6. SIAPP

SIAPP atau Aplikasi Absensi Para Pihak yang merupakan salah satu Inovasi Pengadilan Negeri Pekalongan yang berguna untuk memudahkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memonitor kehadiran para pihak berperkara yang akan melaksanakan sidang. SIAPP akan menyajikan data para pihak secara otomatis sesuai jadwal sidang dari SIPP. Para pihak yang akan sidang bisa mengisi secara mandiri absen persidangan melalui anjungan konfirmasi kehadiran pihak diruang Lobby PTSP kemudian sistem akan mengirimkan notifikasi pesan whatsapp secara otomatis kepada Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara.

SIAPP telah diresmikan penggunaannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa, 25 Oktober 2022 bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Dinas Bulan Oktober 2022.



Gambar 5.9. Gambar Aplikasi “SIAPP”

7. VIDEO INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DENGAN BAHASA ISYARAT

Video mengenai informasi pelayanan publik dilengkapi dengan bahasa isyarat merupakan salah satu media informatif yang ditujukan langsung kepada Masyarakat pencari keadilan khususnya Penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan publik yang ada di Pengadilan Negeri Pekalongan.

dengan adanya video ini diharapkan dapat meningkatkan nilai mutu Pelayanan PN pekalongan dalam memberikan pelayanan prima bagi kelompok disabilitas.



Gambar 5.10. Gambar Video Informasi Pelayanan Publik dengan Bahasa Isyarat

8. ANTRIAN PRIORITAS

Layanan Antrian Prioritas merupakan inovasi yang ditujukan untuk kelompok rentan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Negeri Pekalongan ini ditunjukkan bagi kelompok rentan yang membutuhkan pelayanan di Pengadilan Negeri Pekalongan, selain itu, layanan ini juga sejalan dengan salah satu Nilai Mahkamah Agung RI yaitu perlakuan sama di hadapan hukum, seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa sistem peradilan dapat

diakses oleh semua orang termasuk kelompok rentan yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik dalam hal sarana-prasarana, prosedur hukum, paradigma aparaturnya sehingga seluruh kelompok rentan dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan. Oleh karenanya lingkup dari layanan Antrian ini mencakup unit kerja Pengadilan Negeri Pekalongan, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Mahkamah Agung secara keseluruhan.



Gambar 5.11. Gambar Kartu Antrian Prioritas

BAB VI PENGAWASAN

Upaya untuk melaksanakan pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB salah satunya adalah melalui diadakannya pertemuan/rapat bulanan setiap bulan dengan para hakim dan seluruh pegawai untuk mengevaluasi tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya dan hal-hal lain yang dianggap penting.

A. Internal

Untuk lebih mengintensifkan fungsi pengawasan telah disusun Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Nomor : W12.U4/154/KP.07.01/VII/2022, tanggal 11 Agustus 2022 tentang Penunjukan Koordinator Pengawas, Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas dan Pengamat dan Juru Bicara Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Adapun Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang tersebut adalah sebagai berikut :

No	NAMA	BIDANG PENGAWASAN
1	FATRIA GUNAWAN, S.H.,M.H.	1. Koordinator Pengawas 2. Juru Bicara dan Humas
3	MUKHTARI, S.H.,M.H.	Kepaniteraan Perdata
4	HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H.	1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala;
5	BUDI SETYAWAN, S.H.	Kepaniteraan Hukum
6	MUHAMMAD TAOFIK, S.H.	Kepaniteraan Pidana
7	MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H	Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan

Tabel. 6.1. Tabel Hakim Pengawas

Sesuai Buku I Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan, pembagian tugas Pengawasan Internal meliputi :

1. Ketua

Melakukan pengawasan internal mengenai:

- a. Ketepatan waktu memulai persidangan.

- b. Penyusunan court calendar.
- c. Minutasi harus tepat waktu, terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan tahanan.
- d. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan.
- e. Dalam menentukan nilai harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon lelang.
- f. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
- g. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupankas.
- h. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirim laporan dan hasil evaluasi secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- i. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan pejabat struktural dan pegawai yang dibuat secara berjenjang.

2. Wakil Ketua

Melakukan pengawasan internal mengenai :

- a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan realitasnya.
- b. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
- c. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/ Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
- d. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.
- e. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ICW dan

- peraturan pelaksanaannya).
- g. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak, pemberitahuan putusan Hakim dan lain-lainnya, agar benar-benar sampai kepada yang berhak;
 - h. Penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan rekening yang terpisah antara keuangan perkara dan keuangan APBN.
 - i. Penataan jam kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tertib kantor

3. Hakim

Melakukan pengawasan internal mengenai:

- a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata, perkara pidana dan eksekusi yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan .
- b. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana, Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan di Pekalongan.

B. Evaluasi

Evaluasi Pengawasan internal dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat bulanan berjenjang dimulai dari satuan terkecil perbagian, kemudian pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang dan berujung pada Pengawasan Internal melalui rapat dinas bulanan yang diadakan secara rutin setiap bulan. Rapat bulanan ini dihadiri oleh para Hakim, Panitera, Sekretaris, para Pejabat Struktural dan Fungsional, para Panitera Pengganti, para Jurusita/Jurusita Pengganti , Staf dan para PPNPN pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB. Rapat Bulanan ini dipimpin langsung oleh Ketua dengan didampingi Koordinator Hakim Pengawas, para Hakim Pengawas, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB.

Dalam hal meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai, telah dilaksanakan pemberian reward kepada Hakim, Panitera Pengganti, Staf

dan PPNPN Terbaik yang dilaksanakan setiap Bulan. Penyerahan penghargaan ini langsung oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Pekalongan.



Gambar 6.1. Gambar Dokumentasi pemberian Reward oleh pimpinan Pengadilan Negeri Pekalongan

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dikemukakan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB Tahun 2022 ini dapat disimpulkan : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki apabila pelaksanaan administrasi yang tertib dan teratur, disiplin serta tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai pula.

B. Rekomendasi

Guna mendukung upaya Peningkatan Kinerja pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB di tahun mendatang :

1. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis agar dihasilkan tenaga yang terampil secara teknis dan organisatoris, profesional dalam bidangnya.
2. Perlu penambahan Tenaga/Pegawai sebagai Pranata Komputer dan Tenaga Pengelola Registrasi Perkara yang memadai.
3. Untuk mendapatkan perhatian terhadap kondisi Rumah Dinas Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim maupun Rumah Dinas untuk Panitera dan Sekretaris. Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB kondisinya rusak sehingga sangat mendesak sekali untuk diadakan rehab. Sedangkan Rumah Dinas Hakim dan Panitera 13 (tiga belas) unit kondisinya rusak berat dan

kebanjiran juga perlu direhab.

4. Dalam penyusunan RKA-KL tahun 2024 Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB masih membutuhkan:

- Tersedianya anggaran untuk pengadaan mesin absensi wajah, untuk melengkapi data absensi yang selama masa pandemi ini hanya menggunakan absensi via SIKEP MARI dan absensi manual.
- Tersedianya anggaran untuk pengadaan Kamera Mirrorless yang sangat dibutuhkan untuk dokumentasi kegiatan-kegiatan Satuan Kerja, yang mana saat ini sarana dokumentasi masih menggunakan perangkat pribadi Pegawai.
- Tersedianya anggaran untuk rehab rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua.
- Tersedianya anggaran untuk rehab rumah dinas Hakim sebanyak 13 (tiga belas) unit.
- Tersedianya anggaran untuk pengadaan AC Standing untuk Ruang Sidang dan AC Split untuk penyejuk ruangan;
- Tersedianya anggaran untuk pengadaan computer, laptop dan Printer untuk menunjang administrasi perkara maupun administrasi kesekretariatan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB tahun 2022 yang dapat kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-NYA, sehingga jajaran Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas IB dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan keadilan di wilayah hukum Kota dan Kabupaten Pekalongan khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

